

Kebijakan Moneter Dalam Islam

Dea Putri Ananda¹ Halimatiara² Riska Ardila Hasanah³ Rizki Maulana⁴ Dika Syahputra⁵

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: deaputri962@gmail.com¹ tiarabks298@gmail.com² riskaardilaa001@gmail.com³
rizkimaulana5273@gmail.com⁴ dksyhp07@gmail.com⁵

Abstrak

Kebijakan moneter adalah instrumen bank Indonesia yang dirancang sedemikian rupa yang digunakan untuk mengendalikan variabel-variabel finansial, seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang. Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu Studi *research library* yang merupakan studi kepustakaan, artinya informasi dikumpulkan melalui penggunaan sumber-sumber perpustakaan, seperti penelusuran literatur. Sistem moneter sepanjang zaman telah mengalami banyak perkembangan, sistem keuangan inilah yang paling banyak di lakukan studi empiris maupun historis bila di dibandingkan dengan disiplin ilmu ekonomi lainnya. sistem keuangan pada zaman Rasulullah saw. di gunakan bimatalic standard yaitu emas dan perak (dirham dan dinar) karena keduanya merupakan alat pembayaran yang sah dan beredar di masyarakat. Pada dasarnya kebijakan moneter merupakan kebijakan untuk mengelola permintaan dan penawaran uang sehingga kondusif bagi pembangunan ekonomi.

Kata Kunci: Kebijakan Moneter Dalam Islam



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perekonomian di suatu Negara harus mempunyai program yang terencana dan terarah serta membutuhkan banyak modal atau dana untuk pembangunan nasional yang tidak sedikit. Tidak heran jika pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan pada kinerja bank sebagai lembaga keuangan Negara. Lembaga keuangan dianggap mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun suatu perekonomian di suatu Negara. Bank dalam perekonomian sangat berperan penting sebagai lembaga yang bisa mempengaruhi kegiatan perekonomian di suatu Negara. Bank juga merupakan media dalam mempengaruhi jumlah uang yang beredar yang kondisi tersebut menjadi sasaran kebijakan moneter.¹ Kebijakan moneter adalah instrumen bank Indonesia yang dirancang sedemikian rupa yang digunakan untuk mengendalikan variabel-variabel finansial, seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang. Hal yang ingin dicapai adalah memelihara kestabilan nilai uang baik terhadap faktor internal maupun eksternal. Stabilitas nilai uang menggambarkan stabilitas harga yang pada akhirnya akan mempengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan perekonomian suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi riil yang optimun dan stabilitas ekonomi.

Kebijakan moneter merupakan hal yang paling penting dalam pengendalian perekonomian nasional. Namun, perbedaan sistem ekonomi yang berlaku akan memunculkan pandangan yang berbeda tentang kebijakan moneter. Sistem ekonomi konvensional memiliki pandangan yang berbeda tentang kebijakan moneter dengan sistem ekonomi islam. Sistem ekonomi moneter islam merupakan sistem ekonomi Islam yang memiliki tujuan yang hendak dicapai, dalam moneter islam diantaranya adalah untuk mewujudkan keadilan dan

¹ Dini Abdiinti, 'Konsep Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam', 1.3 (2023).

kemaslahatan. Maqashid syariah menegakkan keadilan (Iqamah al' Adl) yaitu mewujudkan keadilan dalam semua bidang kehidupan manusia dan menghasilkan kemaslahatan (jalb al maslahah), yaitu menghasilkan kemaslahatan yang khusus untuk pihak tertentu.²

METODE PENELITIAN

Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu Studi *research library* yang merupakan studi kepustakaan, artinya informasi dikumpulkan melalui penggunaan sumber-sumber perpustakaan, seperti penelusuran literatur. Sumber yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti itulah yang dimaksud dengan literatur. Memahami literatur akan membantu memahami sifat masalah yang dihadapi, dengan memahami literatur akan membantu memahami tujuan dari masalah.³

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Kebijakan Moneter Islam

Sistem moneter sepanjang zaman telah mengalami banyak perkembangan, sistem keuangan inilah yang paling banyak di lakukan studi empiris maupun historis bila di bandingkan dengan disiplin ilmu ekonomi lainnya. sistem keuangan pada zaman Rasulullah saw. di gunakan bimatalic standard yaitu emas dan perak (dirham dan dinar) karena keduanya merupakan alat pembayaran yang sah dan beredar di masyarakat. Nilai tukar emas dan perak pada masa Rasulullah saw. ini relatif stabil dengan nilai kurs dirham-dinar 1:10, namun demikian, setabilitas nilai kurs pernah mengalami gangguan karena adanya disequilibrium antara supply dan demand. Misalkan pada masa Bani Umayyah (41/662-132/750) rasio kurs antara dinar-dirham 1:12, sedangkan pada masa Abbasiyah (132/750-656/1258) berada pada kisaran 1:15.

Pada masa yang lain nilai tukar dirham-dinar mengalami fluktuasi dengan nilai oaling rendah pada level 1:35-1:50. Instabilitas dalam nilai tukar yang ini akan mengakibatkan terjadinya bad coins out of circulations atau kualitas buruk akan menggantikan uang kualitas baik, dalam literatur konvensional peristiwa ini di sebut hukum Gresham. Seperi yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Bany Mamluk (1263-1328), dimana mata uang yang beredar tersebut dari fulus (tembaga) mendesak keberadaan uang logam emas dan perak . oleh ibnu taimiyah di katakana bahwa uang dengan kualitas rendah akan menendang keluar uang kualitas baik. Perkembangan emas sebagai standar dari uang beredar mengalami tiga kali evolusi yaitu:

- a. The gold cins standard: di mana logam emas mulia sebagai uang yang aktif dalam peredaran
- b. The gold bullion standard: di mana logam emas sebagai para meter dalam menentukan nilai tukar uang yang beredar.
- c. The gold exchange standard (bretton woods system): di mana otoritas moneter menentukan nilai tukar domestic currency dengan foreign currency yang mampu di back-up secara penuh oleh cadangan emas yang dimiliki. Dengan perkembangan sistem keuangan yang demikian pesat telah memunculkan uang fiducier (kredit money) yaitu uang yang keberadaannya tidak diback-up oleh emas dan perak.⁴

² Anisa Mawaddah Nasution and Maryam Batubara, 'Penerapan Kebijakan Moneter Islam Pada Sistem Perekonomian Indonesia', *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 7.1 (2023), 144–54 <<https://doi.org/10.33059/jensi.v7i1.7665>>.

³ Retnawati Siregar, M. Shabri Abd. Majid, *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi Vol. 7, No. 1, 2023, h 75

⁴ Luqmanul Hakiem Ajuna, *Kebijakan Moneter Syariah*, and A Pendahuluan, 'Kebijakan Moneter Syariah', 2017.

Kebijakan Moneter dan Bank Sentral pada Masa Islam Klasik

Pada dasarnya kebijakan moneter merupakan kebijakan untuk mengelola permintaan dan penawaran uang sehingga kondusif bagi pembangunan ekonomi. Pada masa Islam awal, telah dikenal sebuah lembaga, yaitu Baitul Maal yang berperan serupa dengan bank sentral yang kita kenal pada masa kini. Baitul Maal merupakan Central Finance House yang memiliki cabang-cabang di seluruh negeri Islam, dimana ia menjalankan hampir semua fungsi dari bank sentral masa kini, seperti menerbitkan uang dan menjaga stabilitas nilainya. Baitul Maal merupakan konsep perbendaharaan negara yang luas, bahkan terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa semua harta benda kaum muslimin merupakan sebagian dari Baitul Maal, terlepas dari lokasi fisiknya. Konsep Baitul Maal mendasar kepada suatu keyakinan dasar ajaran Islam bahwa Allah S.w.t adalah pemilik mutlak alam raya ini, sementara manusia hanyalah amanah untuk memanfaatkan alam semesta ini. Negara (kekhalifahan) dibentuk untuk mengemban amanah ajaran-ajaran Allah, termasuk didalamnya menjaga kesejahteraan dan mengatur hak milik masyarakat atas harta benda. Dalam rangka menjalankan fungsi inilah kemudian dibentuk Baitul Maah, yang terdiri dari tiga macam institusi, yaitu:

- a. Baitul Maal al-Khas;
- b. Baitul Maal;
- c. Baitul Maal al-Muslimin.

Baitul Maal al-Khas merupakan institusi perbendaharaan negara yang khusus berfungsi mengelola dana penyelenggaraan pemerintah, seperti pengeluaran pribadi khalifah, perawatan fasilitas kekhalifahan, serta pengeluaran khusus lainnya. Sedangkan Baitul Maal merupakan bank bagi negara Islam. Tugas lembaga ini memang masih sederhana, tetapi menjalankan fungsi-fungsi dasar bank sentral sebagaimana dalam perekonomian modern. Baitul Maal juga tidak menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, meskipun pada waktu itu perdagangan dan kegiatan usaha relatif cukup maju. Masyarakat Islam dalam meningkatkan usahanya terbiasa memanfaatkan modal dari pihak lain, tetapi mekanismenya bukan melalui pinjam-meminjam, melainkan perkasama permodalan (syirkah). Praktek seperti ini cukup menyebar luas dikalangan kaum muslimin Madinah, tetapi tidak dilakukan oleh Baitul Maal. Pengawasan terhadap suku bunga, sebagaimana bank sentral modern, tentu saja tidak dilakukan, karena Islam melarang praktek pembunga uang. Sementara itu, Baitul Maal al-Muslimin merupakan lembaga perbendaharaan dalam arti yang lebih luas, yaitu perbendaharaan bagi seluruh kaum muslimin dan masyarakat umum, yang memiliki fungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana bagi kepentingan umum, misalnya penyediaan pekerjaan umum, perbaikan jalan dan jembatan, peningkatan kesejahteraan bagi fakir miskin, serta fungsi publik lainnya. Sehingga sejarah telah membuktikan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan tidak hanya menyangkut masyarakat muslim saja, karena pada waktu Rasulullah atau para khulafaurrasyidin sangat heterogen. Mereka semua mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan dari pemerintah Islam.⁵

Tujuan Moneter Islam Dalam Ekonomi Islam

Tujuan yang akan di capai dalam kebijakan moneter islam merupakan sebuah tujuan yang baik yaitu dalam rangka memperbaiki sistem perekonomian negara. Untuk memperoleh dan menetapkan apakah moneter islam telah berfungsi dengan baik biasanya moneter islam akan melakukan suatu kegiatan pengawasan pada setiap sistem yang ada. Sektor dalam

⁵ I Vol, 'Co-Management', I.2 (2019).

kebijakan moneter adalah sebuah jaringan yang cukup penting dan dapat membawa pengaruh yang baik terhadap sektor riil. Kebijakan moneter islam bertujuan untuk :⁶

- a. Kesejahteraan Ekonomi Dengan Kesempatan Kerja Penuh. Pada masalah ini akan berkaitan erat dengan pembahasan maqashid syariah. Karena maqashid syariah mengandung makna membawa kemaslahatan bagi manusia. Dan dalam mewujudkan kesejahteraan manusia itu apabila seluruh kebutuhan utama manusia telah terpenuhi sehingga pembahasan mengenai kesejahteraan akan berkaitan dengan maqashid syariah. Kesejahteraan manusia bukan dalam hal memperbanyak harta dan untuk dikonsumsi secara pribadi dan tanpa mempedulikan orang lain akan tetapi harta yang dimiliki juga harus dibagikan secara aturan dalam islam melalui zakat.
- b. Keadilansosio-Ekonomi Dan Distribusi Pendapatan Dan Kekayaan. Keadilan merupakan peletakan sesuatu pada tempatnya. Nilai-nilai keadilan akan selalu berpatokan kepada prinsip persamaan dan persaudaraan. Keadilan ini selalu membuat kita berfikir bahwa imbalan materi harus diberikan secara wajar atas pekerjaan dan kontribusi seseorang dalam sebuah bisnis.
- c. Stabilitas Nilai Uang. Stabilitas nilai uang merupakan sebuah aturan yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan perekonomian manusia baik secara idiologi maupun praktek, karena uang akan menentukan berapa nilai dan harga suatu produk baik itu produk barang dan jasa.⁷

Instrumen Kebijakan Moneter Ekonomi Islam

Kebijakan moneter yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui bank sentral. Untuk mengarahkan dan mengendalikan perekonomian di suatu Negara ke arah atau kondisi yang ingin di capai. Kebijakan moneter pada ekonomi islam hanya sebagai pelengkap untuk sektor riil. Pada ekonomi islam tidak mengakui adanya instrumen bunga dalam kegiatan perekonomian karena hal itu jelas di dalam al-Quran bahwa bunga bank adalah riba. Pelarangan riba ini bermaksud agar hubungan mitra kerja antara pemilik modal dan usaha berlaku adil. Adapun alat kebijakan moneter dalam ekonomi syariah yaitu hukum Syariah. Implementasi dari semua instrumen kebijakan moneter konvensional dan barang berharga juga mengandung komponen bunga dan riba. Oleh sebab itu, instrumen konvensional yang memasukkan suku bunga dan riba tidak dapat dipakai untuk menerapkan kebijakan moneter yang berbasis syariah.⁸ Chapra, menyebutkan mekanisme instrumen kebijakan moneter yang berdasarkan syariah sangat berbeda dengan ekonomi lain diantaranya:

- a. Target pertumbuhan M dan Mo, dimana setiap tahun bank sentral menentukan pertumbuhan peredaran uang dengan sasaran ekonomi nasional.
- b. Saham publik terhadap deposito atas uang giral.
- c. Cadangan wajib resmi, dimana bank komersial harus memiliki cadangan wajib di bank sentral.
- d. Pembatasan kredit, dimana kebijakan pembatasan kredit boleh dilakukan oleh bank komersial untuk memberikan jaminan atas penciptaan kredit sesuai dengan target moneter.
- e. Alokasi kredit yang berbasis pada nilai, dimana realisasi kredit harus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Instrumen atau alat kebijakan moneter yang dikenal dalam ekonomi Islam antara lain dalam bentuk kontrol kuantitatif pada penyaluran pembiayaan dan instrumen yang dapat

⁶ Fungsi Dan kedudukan Isbat, : ' Fungsi Dan kedudukan Isbat ...', 15 (2015), 31-46.

⁷ Evi Sugiatni, 'KEBIJAKAN MONETER DALAM PERSPEKTIF ISLAM', *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR (UINAM)*.

⁸ Nur Aini Latifah 'Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Syariah'.

menjamin alokasi pembiayaan dapat berlangsung dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif.⁹ Instrumen besar pertama (kontrol kuantitatif penyaluran pembiayaan) didukung dengan instrumen moneter berupa:

- a. Statutory Reserve Requirement (cadangan wajib minimum). Banyak bank sentral yang melakukan reduksi dan eliminasi cadangan minimum untuk menjadikan bank lebih kompetitif. Akan tetapi dalam ekonomi Islam dicount rate dan open market operation tidak dapat diterapkan, maka instrumen yang paling memungkinkan adalah bank konvensional diwajibkan menempatkan sebagian dari dananya yang berasal dari demand deposits pada bank sentral sebagai cadangan wajib. Reserve requirement ini hanya berlaku untuk demand deposit, sedangkan mudharabah deposit tidak memerlukan cadangan deposit, karena mudharabah merupakan penyertaan (equity) dari penabung pada bank tersebut dan memiliki kemungkinan laba maupun resiko rugi. Dalam sistem ekonomi yang berlaku saat ini reserve requirement diterapkan terhadap total deposit karena kesulitan membedakan antara demand dan saving deposit. Sedangkan dalam ekonomi Islam lebih mudah membedakannya. Selain itu penerapan reserve requirement terhadap total deposit tidak hanya untuk mengatur penyaluran pembiayaan tetapi juga untuk menjamin kebutuhan dan menjamin kecukupan likuiditas sistem perbankan. Reserve requirement yang diberlakukan di Sudan sedikitnya 20% (10% untuk simpanan dalam mata uang asing) dari total dana masyarakat (kecuali simpanan investasi) yang harus disimpan di BOS (Bank sentral Sudan). Di Iran, ketentuan rasio cadangan antara 10%-30% sedangkan di Indonesia giro wajib minimum (GWM) berkisar antara 5% dalam bentuk IDR dan 3% dari dana pihak ketiga dalam bentuk mata uang asing.
- b. Financing Ceiling. Selain Reserve requirement, keberhasilan manajemen moneter perlu juga mempertimbangkan sistem penyaluran pembiayaan yang efektif agar tidak melampaui jumlah yang ditargetkan. Pagu pembiayaan penting untuk menjamin total pembiayaan yang disalurkan konsisten dengan target moneter. Misalnya di Sudan plafon pembiayaan untuk sektor prioritas di daerah tersebut adalah pertanian, ekspor, perindustrian, pertambangan dan energi, transportasi dan pergudangan, profesional, pengrajin, dan lain-lain. Dengan ketentuan 90% dari dana pembiayaan harus dialokasikan pada sektor prioritas tersebut.
- c. Government Deposits. Instrumen moneter yang juga mempengaruhi cadangan dari bank komersial adalah kewenangan bank sentral untuk dapat memindahkan demand deposit pemerintah yang ada pada bank sentral ke dan dari bank komersial. Instrumen ini terbukti cukup efektif di Saudi Arabia terutama dalam mempengaruhi cadangan bank komersial secara langsung dan fungsinya sama seperti open market operation yang mempengaruhi cadangan bank komersial secara tidak langsung.
- d. Common pool. Common pool adalah instrumen yang mensyaratkan bank-bank komersial menyisihkan sebagian dari deposit yang dikuasainya dalam proporsi tertentu berdasarkan kesepakatan bersama guna menanggulangi masalah likuiditas.
- e. Moral Suasion. Merupakan instrumen yang lebih penting pada bank sentral yang menerapkan prinsip-prinsip syari'ah melalui kontak-kontak personal, konsultasi dan pertemuan-pertemuan dengan bank komersial, bank sentral dapat lebih cepat dan mampu memonitor kekuatan dan masalah yang dihadapi bank-bank komersial. Dengan demikian bank sentral dapat dengan jelas dan tepat memberikan pemecahan permasalahan yang dihadapi perbankan secara umum.
- f. Perubahan tingkat loss & profit sharing ratio. Adanya variasi rasio laba rugi untuk aktivitas mudharabah yang dikeluarkan oleh bank sentral kepada bank komersial dan juga untuk

⁹ Siti Aisyah and others, 'Aktualisasi Kebijakan Moneter Islam Dalam Permasalahan Makro Ekonomi Islam'.

para deposan kepada para wirausahawan yang melakukan transaksi deposit dan pembiayaan dengan akad mudharabah di bank komersial sangat disarankan, mengingat dalam mekanisme mudharabah keuntungan yang diperoleh bisa berubah-ubah dan rasio bagi hasil dan rugi ditentukan oleh keuntungannya.¹⁰

KESIMPULAN

Sistem moneter sepanjang zaman telah mengalami banyak perkembangan, sistem keuangan inilah yang paling banyak dilakukan studi empiris maupun historis bila dibandingkan dengan disiplin ilmu ekonomi lainnya. Sistem keuangan pada zaman Rasulullah saw. di gunakan bimatalic standard yaitu emas dan perak (dirham dan dinar) karena keduanya merupakan alat pembayaran yang sah dan beredar di masyarakat. Pada dasarnya kebijakan moneter merupakan kebijakan untuk mengelola permintaan dan penawaran uang sehingga kondusif bagi pembangunan ekonomi. Tujuan yang akan di capai dalam kebijakan moneter islam merupakan sebuah tujuan yang baik yaitu dalam rangka memperbaiki sistem perekonomian negara. Kebijakan moneter yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui bank sentral.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdianti, Dini, 'Konsep Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam', 1.3 (2023)
- Aisyah, Siti, Universitas Islam, Indragiri Tembilahan, Siti Nurmala, Universitas Islam, and Indragiri Tembilahan, 'Aktualisasi Kebijakan Moneter Islam Dalam Permasalahan Makro Ekonomi Islam'
- Ajuna, Luqmanul Hakiem, Kebijakan Moneter Syariah, and A Pendahuluan, 'Kebijakan Moneter Syariah', 2017
- Anisa Mawaddah Nasution, and Maryam Batubara, 'Penerapan Kebijakan Moneter Islam Pada Sistem Perekonomian Indonesia', *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 7.1 (2023), 144–54 <<https://doi.org/10.33059/jensi.v7i1.7665>>
- Dan, Fungsi, and Kedudukan Isbat, : 'Fungsi Dan Kedudukan Isbat ...]', 15 (2015), 31–46
- Evi Sugiatni, 'KEBIJAKAN Moneter Dalam Perspektif Islam', *Universitas Islam Negeri Makassar (Uinam)*
- Kholiq, Achmad, *Teori Moneter Islam (Edisi Revisi)*
- Nur Aini Latifah_____, 'Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Syariah' Vol, I, 'Co-Management', I.2 (2019)

¹⁰ Achmad Kholiq, *TEORI MONETER ISLAM (Edisi Revisi)*.